



## **SEKOLAH RAKYAT UNTUK PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Fieka Nurul Arifa\*

### Abstrak

*Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial dan faktor sosial budaya. Pada Agustus 2024, tercatat ada 4,6 juta anak yang putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengembangkan konsep "Sekolah Rakyat," yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang mirip dengan sekolah berasrama, dengan harapan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan serta membantu memutus mata rantai kemiskinan. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini melibatkan Kementerian Sosial dan memungkinkan kerja sama dengan pihak swasta. Meski memiliki potensi besar, program ini menghadapi tantangan seperti pendanaan berkelanjutan, kualitas pengajaran, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat. Kajian ini menguraikan potensi dan tantangan Sekolah Rakyat dalam pemerataan pendidikan berkualitas. Pemerintah dan Komisi X DPR RI diharapkan dapat memastikan implementasi program ini berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.*

### **Pendahuluan**

Keterbatasan akses pendidikan akibat kemiskinan menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial yang menghalangi mereka untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya transportasi, atau bahkan mendapatkan gizi yang cukup untuk menunjang pembelajaran mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga sering kali menjadi penghalang, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih cenderung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus jika akses pendidikan tidak diperluas secara inklusif. Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024 pada bulan Agustus, jumlah anak putus sekolah berjumlah 4,6 juta orang (Decemberia, 2024).

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: fieka.arifa@dpr.go.id

Untuk mengatasi putus sekolah akibat kemiskinan, pemerintah menginisiasi pendirian “Sekolah Rakyat” sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin ekstrem. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada 4 Februari 2025 menyatakan bahwa pendirian Sekolah Rakyat masih dalam tahap pematangan konsep (Janati & Setuningsih, 2025), di mana rencana implementasi awal akan diselenggarakan di Jakarta dan sekitarnya (Ameliya, 2025). Pematangan konsep menjadi bagian penting agar implementasinya tidak menjadi permasalahan baru di kemudian hari. Kajian ini menguraikan potensi dan tantangan Sekolah Rakyat dalam pemerataan pendidikan berkualitas.

## **Sekolah Rakyat sebagai Inisiatif Pendidikan Inklusif**

Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya kelompok miskin ekstrem agar dapat mengakses pendidikan berkualitas secara gratis. Perintah pembentukan Sekolah Rakyat, disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025 (Ananda, 2025).

Meskipun merupakan inisiatif baru, gagasan Sekolah Rakyat sebenarnya telah ada sejak masa perjuangan Indonesia melawan penjajah. Pada era penjajahan Jepang, Sekolah Rakyat yang saat ini menjadi Sekolah Dasar (SD) dirintis sebagai upaya mencerdaskan rakyat Indonesia secara luas (Putra, 2025). Pada masa itu, pemerintah membuka Sekolah Rakyat secara luas di seluruh Indonesia tanpa biaya bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia, termasuk memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik.

Seiring perkembangannya, SD di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan terpencil, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, serta pengelolaan sekolah di era digitalisasi. Bahkan hingga saat ini masih banyak anak yang belum dapat mengakses pendidikan di jenjang SD. Tahun 2024 jumlah anak yang tidak bersekolah pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 649.600 anak, Jenjang SMP/ sederajat sebanyak 1.067.214 anak, dan jenjang SMA/ sederajat sebanyak 371.942 anak (Portal Data Pendidikan, 2025).

Sekolah Rakyat yang kembali digagas saat ini dirancang menyerupai konsep sekolah berasrama (*boarding school*), dengan tujuan memberikan pendidikan yang utuh dan memastikan asupan gizi yang baik bagi siswa (Rosa, 2025). Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai rencana pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah yang baik dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia (Safitri, 2025). Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini, pemerintah sedang membahas berbagai aspek teknis, termasuk sumber anggaran dan kapasitas sekolah (Ameliya, 2025).

Berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Namun, Kemendikdasmen tetap akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ketika Sekolah Rakyat sudah berdiri. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat direncanakan akan diselenggarakan di Jakarta dan sekitarnya. Setelah itu akan diselenggarakan di daerah lain dengan prioritas daerah terpencil dan keluarga penerima manfaat dari golongan miskin ekstrem. Ada kemungkinan program ini juga akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Selain itu, Sekolah Rakyat tidak membangun gedung baru tetapi mengoptimalkan pemanfaatan bangunan yang sudah ada. Fasilitas balai pelatihan milik pemerintah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai perintis Sekolah Rakyat (Safitri & Belarminus, 2025).

### **Potensi dan Tantangan Sekolah Rakyat**

Dengan konsep sekolah berasrama yang dikelola negara, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi konkret dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kolaborasi Kemensos dengan Kemendikdasmen menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Di tengah tantangan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil, Sekolah Rakyat dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Model pendidikan gratis ini juga dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan dengan membekali siswa keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, di samping juga menjamin anak memperoleh asupan gizi yang mendukung tumbuh kembangnya. Dengan adanya program ini, Indonesia berpeluang meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata di seluruh wilayah.

Berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang memadai, pemerintah berencana menggunakan balai pelatihan sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat. Hal ini memungkinkan penggunaan infrastruktur yang sudah tersedia sehingga mempercepat implementasi program. Sementara dari sisi pendanaan, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan pihak swasta. Potensi kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta membuka peluang untuk pendanaan yang lebih stabil, serta peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program bantuan.

Namun demikian, rencana pendirian Sekolah Rakyat dihadapkan pada tantangan yang mencakup berbagai aspek. *Pertama*, sumber pendanaan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat rencana kolaborasi dengan pihak swasta, kesinambungan pendanaan masih menjadi tantangan besar agar program ini dapat berjalan dalam jangka panjang tanpa kendala finansial. *Kedua*, kualitas pengajaran dan kurikulum. Penyediaan tenaga pengajar

yang berkualitas serta kurikulum yang sesuai menjadi faktor penting. Tantangan dalam merekrut dan melatih tenaga pengajar yang kompeten harus diatasi untuk menjamin efektivitas pendidikan. *Ketiga*, kesiapan infrastruktur. Meskipun akan memanfaatkan balai pelatihan, kesiapan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar harus dipastikan, termasuk asrama, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya. *Keempat*, sosialisasi dan penerimaan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini harus ditingkatkan agar mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama keluarga dari calon siswa.

Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, pemerintah perlu mematangkan konsep Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis. Penting bagi pemerintah untuk memastikan berbagai aspek teknis, seperti pendanaan yang berkelanjutan, kualitas pengajaran, serta kesiapan infrastruktur, agar program ini berjalan dengan lancar dan dapat memberi dampak positif jangka panjang. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang mendukung kesuksesan program. Dengan konsep yang matang, Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik dalam memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

## **Penutup**

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem. Dengan konsep sekolah berasrama dan dukungan dari berbagai pihak, program ini berpotensi menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan. Namun, agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan, tantangan terkait pendanaan, kualitas pengajaran, serta kesiapan infrastruktur perlu menjadi perhatian utama.

Komisi X DPR RI berperan penting dalam memastikan program ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selain mendorong pematangan konsep dan perencanaan yang komprehensif, Komisi X DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap jalannya program agar sesuai dengan tujuan awal. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan harus terus dipastikan agar Sekolah Rakyat benar-benar mampu menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

## Referensi

- Ananda, R. S. (2025, Februari 4). *Kemensos jajaki pendirian Sekolah Rakyat di Bekasi*. kemensos.go.id. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/wakil-menteri-sosial-1/Kemensos-Jajaki-Pendirian-Sekolah-Rakyat-di-Bekasi>
- Ameliya, T. M. (2025, Januari 13). Mensos sebut pemerintah terus matangkan ide bangun sekolah rakyat. *ANTARA*. <https://www.antaraneews.com/berita/4581006/mensos-sebut-pemerintah-terus-matangkan-ide-bangun-sekolah-rakyat>
- Decemberia, D. (2024, Oktober 31). Koalisi kawal pendidikan di DPR: Anak putus sekolah RI 4,6 juta. *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/53411/koalisi-kawal-pendidikan-di-dpr-anak-putus-sekolah-ri-4-6-juta>
- Janati, S. & Setuningsih, N. (2025, Februari 4). Matangkan konsep, Mensos sebut sekolah rakyat diusahakan mulai tahun ini. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/23225931/matangkan-konsep-mensos-sebut-sekolah-rakyat-diusahakan-mulai-tahun-ini>
- Portal Data Pendidikan. (2025, Januari 7). *Data Set Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah*. data.kemdikbud.go.id. <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/pendidikan-2/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah-2>
- Putra, I. P. (2025, Januari 2029). Sejarah sekolah rakyat di zaman penjajahan Jepang, bakal kembali 'dihidupkan' Prabowo. *medcom.id*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybDjrJAK-sejarah-sekolah-rakyat-di-zaman-penjajahan-jepang-bakal-kembali-dihidupkan-prabowo>
- Rosa, N. (2025, Januari 14). Pemerintah godok konsep sekolah rakyat, Mensos: Mirip boarding school. *Detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7731686/pemerintah-godok-konsep-sekolah-rakyat-mensos-mirip-boarding-school>
- Safitri, K., & Belarminus, R. (2025, Januari 13). Mensos sebut konsep sekolah rakyat masih dimatangkan, mulai dari teknisnya, anggaran, hingga kapasitas. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/13/17100391/mensos-sebut-konsep-sekolah-rakyat-masih-dimatangkan-mulai-dari-teknisnya>
- Safitri, R. D. (2025, Januari 7). DPR minta rencana pembangunan sekolah rakyat tak sekadar wacana. *tirto.id*. <https://tirto.id/dpr-minta-rencana-pembangunan-sekolah-rakyat-tak-sekadar-wacana-g7eT>